
PENGARUH PENGANGGURAN PERTUMBUHAN EKONOMI KEMISKINAN DAN TINGKAT KETERGANTUNGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh

Indah Setiani¹, Ismunawan²^{1,2}Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SurakartaE-mail: 1indahsetiani324@gmail.com, 2wanismu@ymail.com

Article History:

Received: 08-03-2022

Revised: 18-04-2022

Accepted: 20-05-2022

Keywords:

Pengangguran,
Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan, Dan Tingkat
Ketergantungan Terhadap
Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah.

Abstract: *Riset ini bertujuan menguji pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Riset ini dilaksanakan di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah. Penarikan Sampel memakai purposive sampling dengan sampel sebanyak 127 data. Dalam pengumpulan data memakai studi literatur yang diperoleh dari website resmi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Dan Badan Pusat Statistik. Alat analisis memakai analisis regresi berganda diolah dengan spss versi 26. Hasil riset yakni pengangguran dan tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah diberi keleluasaan mengoptimalkan daerah masing-masing. Otonomi daerah menjadi salah satu cara pemerintah pusat untuk melakukan pengelolaan sumber daya dimiliki wilayahnya dalam menaikan perekonomian serta menjadi salah satu alat penyokong tujuan nasional dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Hal tersebut dapat dilihat pada perubahan dalam mengelola finansial wilayahnya masing-masing yang dulunya memakai sistem anggaran manual kini berubah jadi kerangka rencana keuangan berbasis kinerja. Dalam menilai baik atau buruknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah kita dapat menggunakan sebuah kinerja keuangan, kinerja tersebut sebagai tolak ukur bagaimana pemerintah daerah dapat menyerap serta melaksanakan anggaran yang telah di tuangkan dalam APBD untuk mencapai tujuan.

Dilihat dari sebuah berita yang dilansir (Merdeka.com, 2021) Negara Indonesia sekitar 10 tahun terakhir mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi atau sudah dalam tren menurun. Berdasarkan artikel yang dilansir dari merdeka.com pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang terus menerus dan kondisi tersebut mengalami tingkat keparahan pada tahun 2020, karena adanya penyebaran virus corona sehingga melumpuhkan perekonomian secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010

yaitu 6,77%, di tahun 2015 turun di titik 4,88%. Saat tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat rendah sebesar 2,97%, selain itu angka kemiskinan dan pengangguran juga mengalami peningkatan dan hal tersebut membuat Indonesia menjadi turun kembali pada posisi tahun 2017. Proses pemulihan ekonomi di Indonesia menjadi lama karena adanya pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi kunci kesuksesan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berlangsung dengan baik, tetapi saat ini pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah mengalami penurunan, sedangkan kemiskinan & pengangguran mengalami peningkatan. Dalam sebuah artikel yang disampaikan Kompas.com *Tuna Karya* saat 2019 dititik 4,42%, 2020 berubah mencapai presentase 6,48%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 mencapai 5,34%, karena adanya *corona* perekonomian tahun 2020 triwulan I sebesar 2,61%, pada triwulan II mengalami penurunan kembali yang sangat drastis mencapai -5,42%, pada triwulan III turun kembali menjadi -3,92%. Sedangkan pada tahun 2019 kemiskinan mencapai titik 10,58%, tahun 2020 kemiskinan terjadi peningkatan sebesar 11,41% (Kompas.com, 2020). Permasalahan lain yang terjadi saat ini Pemda Jateng sekitar 53,83 % masih bergantung pada pusat (cnnindonesia.com, 2021), hal ini terjadi karena kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi mereka sangat terbatas, selain itu diakibatkan karena covid yang membuat pendapatan mereka menurun. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintahan dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta tingkat ketergantungan masih sangat rendah.

Menurut penelitian sebelumnya yaitu Antonius dkk (2017) mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu yang dilakukan Neni Nurhayati dan Amir Hamzah (2020) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan Ernawati dkk (2021) mengatakan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kiswanto & Noviyanti (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Riset dari Srimulyani dkk (2021) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi menjadi hal utama yang perlu dicapai karena jika pertumbuhan ekonomi tumbuh dengan baik maka pengangguran, kemiskinan dan tingkat ketergantungan akan mengalami penurunan sehingga otomatis pengelolaan keuangan suatu pemerintahan juga akan baik. Pertumbuhan ekonomi seumpama dengan bentuk untuk memperluas ekonomi suatu daerah sehingga bisa menambah penghasilan dan menambah lowongan kerja bagi penduduk yang membutuhkan (Amir & Nurhayati, 2020). Seseorang yang sedang menganggur membuat penghasilan mereka menjadi berkurang sehingga akan membuat kemiskinan menjadi meningkat, hal ini akan berpengaruh terhadap pemerintahan (Harimurti et al., 2017). Selain jika tingkat ketergantungan pada Pemerintah sentral yang berlebihan maka akan memberikan dampak negatif pada kinerja keuangan karena tingkat ketergantungan sangat berpengaruh (Srimulayani & Primadiva, 2021).

Riset (Suryono et al., 2019) menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan. Hafan Dan Panggiarti (2020) melakukan riset dengan hasil bahwa kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah tidak mempengaruhi tingkat

kemiskinan di Kabupaten Magelang. Penelitian terdahulu dilakukan Kusuma Dan Handayani (2017) bahwa tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Suryanta (2019) menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara positif dan signifikan, kinerja pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi pengangguran secara negatif dan signifikan, kinerja pengelolaan keuangan daerah tidak mempengaruhi kemiskinan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Raharja, Suharno, dan Harimurti (2017) yang meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan kemiskinan terhadap kinerja keuangan. Pada penelitian ini ditambahkan tingkat ketergantungan yang didasari oleh riset yang dilakukan Kiswanto dan Noviyanti (2016). Manfaat penelitian guna melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja keuangan, mengingat pada akhir tahun 2019 di seluruh dunia termasuk Negara Indonesia terlebih pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah terdampak pandemi covid-19 akibatnya seluruh perekonomian menjadi lumpuh dan mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Hasil riset ini dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan dijadikan acuan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan agar nantinya perekonomian dimasa akan datang dapat berkembang secara stabil. Pertumbuhan ekonomi masih mengalami penurunan, serta pengangguran, kemiskinan, dan tingkat ketergantungan yang meningkat karena kondisi pandemim covid menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian ini, karena pertumbuhan ekonomi yang rendah akan menyebabkan angka kemiskinan dan pengangguran mengalami kenaikan serta juga akan menyebabkan tingkat ketergantungan dan semua itu adalah komponen penting dalam pemerintah sehingga semua fenomena itu menjadi berpengaruh terhadap kinerja keuangan dalam pemerintahan daerah. Sehingga riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta tingkat ketergantungan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI

Teori Stewardship

Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward berupaya mencapaisasaran organisasinya. Menurut donaldson dan davis (1991) Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu kondisi para manajemen termotivasi untuk tujuan individu melainkan fokus pada kepentingan organisasi (Ikhsan & Supsrasto, 2008:85). Tercapainya keberhasilan dalam pemerintahan dapat dicapai dengan utilitas principals dan manajemen. Teori ini dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi sektor publik seperti organisasi profit lainnya.

Teori Stewardship diasumsikan sebagai hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kinerja perusahaan. Stewardship akan berupaya memaksimalkan kekayaan melindungi organisasi dengan memakai kinerja perusahaan, sehingga fungsi dari utilitas dapat dimaksimalkan. Implikasi Teori Stewardship dalam riset ini menjelaskan bahwa sebagai suatu lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan bagi masyarakat umum dan pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepada pemerintah, sehingga tujuan dari perekonomian dapat terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja ialah sesuatu harus dicapai memuat berbagai faktor yang mempengaruhi

sektor publik dimana kinerja ini sangat dibutuhkan dan dianggap penting pada suatu kegiatan.

Uraian dari implementasi program pemerintah dalam menjangkau wawasan, sasaran, serta tujuan yang bisa dinilai dari aspek keuangan pada pelaksanaan APBD hal tersebut disebut *kinerja keuangan pemerintah daerah* (Sari, 2016).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ialah hasil kerja yang sudah dicapai pada bagian finansial daerah yang didalamnya memuat sumber penghasilan dan biaya daerah yang telah ditentukan pada peraturan undang-undang selama jangka waktu tertentu. Kinerja keuangan sebagai tolak ukur bagaimana untuk melihat baik/buruknya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan (Banjarkab.go.id, 2017). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dikatakan baik apabila pendapatan yang dihasilkan pada suatu daerah sudah mencapai bahkan melebihi dari yang di anggarakan (Ramandani, 2017).

Pengangguran

Pengangguran ialah keadaan dimana seseorang sedang mencari pekerjaan atau tergolong menjadi angkatan kerja tetapi mereka belum memiliki pekerjaan (Kompas.com, 2021).

Pengangguran terbuka ialah 1) seseorang tidak mempunyai pekerjaan, 2) seseorang yang sedang bersiap-siap melakukan suatu usaha, 3) seseorang yg tak mencari mata pencaharian sebab khawatir tak bisa menerima lowongan kerja tersebut, 4) seseorang sudah memiliki sejumlah pekerjaan namun masih belum memulainya (BPS,2021). Karakteristik pengangguran ada dua yaitu berdasarkan penyebabnya dan berdasarkan sifatnya. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya (Endang Mulyani & Asep Nurcahyanto, 2016) ialah 1) Struktural ialah tenaga kerja tidak bisa mengikuti ketrampilan yang diinginkan pemilik kerjaaaan hal ini terjadi karena adanya perubahan pada struktur ekonomi. 2) Konjungtural ialah pekerja tertimpa dampak dari perubahan dalam perekonomian. 3) Friksional ialah pekerja ingin berpindah pada kerjaan yang lebih bagus dari perusahaan ke perusahaan. 4) Musiman ialah karena adanya pergantian musim. Sedangkan pengangguran berdasarkan lama waktu kerja adalah 1) Terbuka ialah seseorang tidak memiliki pekerjaan sama sekali karena berbagai sebab. 2) Setengah menanggung ialah orang yg pekerjaannya kurang dari 35 jam perminggu. 3) Terselubung ialah karyawan tidak melakukan pekerjaannya secara maksimal karena tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Hal-hal yang menjadi penyebab pengangguran (Jatimprov.go.id, 2021) :

1. Kesempatan lowongan kerja dan pertumbuhan angkatan kerja tidak serasi.
2. Terbatasnya kesempatan kerja karena adanya pandemi covid-9 dan kondisi pertumbuhan ekonomi.
3. Kualitas angkatan kerja masih rendah.
4. Adanya kesenjangan antara persediaan pegawai yang dibutuhkan dengan pegawai yang tidak sesuai.
5. Jiwa serta motivasi para pengusaha yang masih rendah dalam membangun lapangan kerja baru.

Dampak pengangguran yang tinggi akan menyebabkan hal berikut (Kompas.com, 2021) :

1. Dampak ekonomi yaitu sumber daya manusia yang terbuang sia-sia akan membuat kesejahteraan masyarakat berkurang dan menjadi beban orang yang bekerja.

2. Dampak sosial yaitu meningkatnya tindakan kriminalitas yang membuat masyarakat menjadi khawatir.

Seseorang bisa dikatakan tuna karya apabila seseorang tidak mempunyai mata pencaharian sehingga orang tersebut akan berkurang pendapatannya, hal ini jika dibiarkan secara menerus maka akan mengakibatkan pengangguran menjadi meningkat serta berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Tetapi apabila tenaga kerja dapat bekerja penuh mereka bisa mencapai titik maksimal, maka pengangguran akan berkurang (Harimurti et al., 2017). Selain itu pemerataan pendapatan harus dicapai semaksimal mungkin sehingga dapat mengurangi pengangguran yang terjadi (Nurulita et al., 2018).

Pengangguran dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penelitian (Harimurti et al., 2017) mengatakan bahwa pengangguran mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan artinya jika seseorang menganggur maka akan membuat pendapatan orang tersebut berkurang dan orang tersebut akan menambah jumlah pengangguran yang terjadi di wilayahnya sehingga nantinya akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah. Pengangguran yang terjadi di masyarakat menyebabkan pendapatan kesejahteraan menjadi berkurang.

H₁: Pengangguran berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses untuk memahami bagaimana ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang (Berliani, 2016) atau dapat diartikan sebagai adanya suatu peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi (Endang Mulyani & Asep Nurcahyanto, 2016) adalah sumber daya manusia, teknologi, sumber daya alam dan modal. Berdasarkan artikel yang dilansir pada (Detik.com, 2021) Indonesia akhir-akhir ini mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan daya beli masyarakat berkurang dan berkurangnya permohonan akan bahan dan pelayanan.

Dampak dari melambatnya pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Terjadinya PHK.
2. Pendapatan masyarakat turun.
3. Meningkatnya kemiskinan.
4. Meningkatnya pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi Yang Baik sebagai kunci kesuksesan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah sudah berjalan dengan baik. Jika pertumbuhan ekonomi menurun maka akan mengakibatkan terjadinya berbagai masalah yang kemudian berdampak pada kinerja keuangan, oleh karena itu Setiap daerah memerlukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik.

Nurhayati & Hamzah (2020) mengatakan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah signifikan. Hal ini menunjukkan jika sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan modal dapat dicapai capai semaksimal mungkin hingga bisa terealisasi maka pendapatan dalam masyarakat tercapai sehingga nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Sedangkan penelitian (Suryono et al., 2019) menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kemiskinan

Kemiskinan ialah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh aspek hidupnya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dll (Arfiani, 2019). Kesukaran semakin kesini semakin sulit diatasi dan menjadi permasalahan fenomenal, karena adanya faktor ketimpangan sosial untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial mengakibatkan kemiskinan terjadi. Ukuran kemiskinan disini diambil dari presentase penduduk miskin disuatu daerah, selain itu faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kemiskinan sebagai berikut (Naga et al., 2018):

1. Kondisi alam dan lingkungan yaitu musibah alam serta sumber daya yang tidak merata.
2. Penduduk yaitu pertambahan masyarakat yang manahan sumber daya alam dan terjadinya imigrasi.
3. Faktor eksploitasi yang terjadi.
4. Teknologi.
5. Kebijakan yang tidak benar serta sering mengabaikan wilayah terpencil atau dikenal dengan faktor struktural dan adat.

Selain faktor diatas kemiskinan juga bisa terjadi karena pendapatan masyarakat mengalami penurunan sehingga mereka kesulitan dalam memenuhi seluruh aspek kebutuhan hidupnya. Kemiskinan perlu utuk diatasi secepat mungkin untuk mengurangi berbagai resiko.

Berdasarkan percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan menggunakan strategi (PP No. 15 Th. 2010) :

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah didorong untuk meningkatkan kentrampilan penduduk sengan meluaskan distribusi biaya permodalan APBD, memperluas pembangunan infrastruktur, investasi, dan lain-lain sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat lalu kemiskinan mulai teratasi dengan adanya hal tersebut, Selain itu kemiskinan juga bisa dikurangi dengan bagaimana pemerintah bisa memberi pembiayaan kepada masyarakat sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ermawati et al., 2021). Pemerintah daerah memerlukan sebuah perkembangan ekonomi yang maksimal dan baik sehingga kemiskinan akan berkurang.

Studi (Ernawati et al., 2021) mengatakan tingkat kemiskinan mempengaruhi kinerja keuangan. Kemiskinan terjadi karena faktor ketimpangan sosial dalam mengakumulasi basic kekuatan sosial, pemerintah didorong untuk meningkatkan distribusi biaya permodalan APBD, memperluas pembangunan infrastruktur, investasi, dan lain-lain sehingga bisa menambah pendapatan masyarakat lalu kemiskinan mulai teratasi. Sedangkan Panggiarti & Hafan (2020) menyatakan kalau kinerjapengelolaan keuangan pemda tidak dipengaruhi kemiskinan di Kabupaten Magelang. Riset ini selaras dengan riset yang dilakukan Andaresta, Aswar, Dan Ernawati (2021) mengatakan bahwa kemiskinan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

H3: Kemiskinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan bisa diketahui dari banyaknya dana perimbangan yang ditransfer pemerintah sentral kepada pemerintah di wilayah masing-masing (Rahmawaty & Aulia, 2020). Dana perimbangan berupa Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Perimbangan dan pemerintah daerah menuturkan alokasi dana publik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilokasikan untuk pemeratakan kompetensi pendanaan antar daerah untuk mendanai keperluan wilayahnya dalam bentuk *desentralisasi* (UU No. 33 Th 2004).

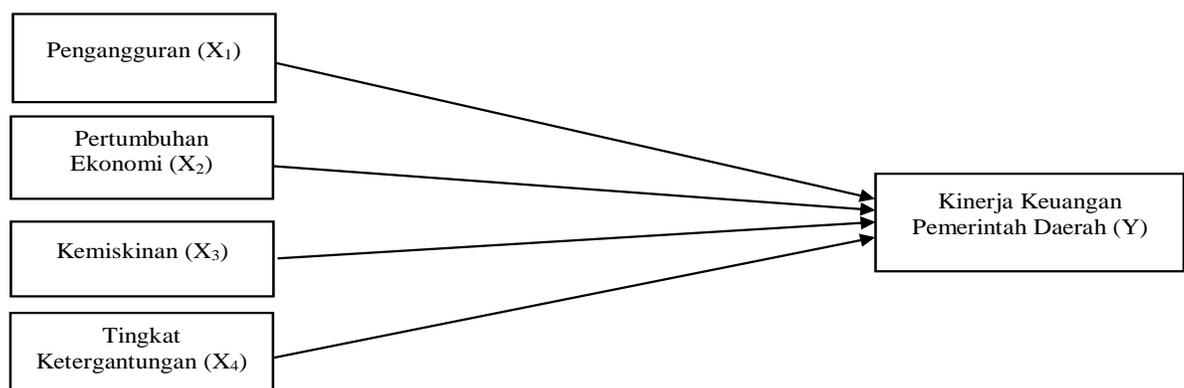
DAU tujuannya sebagai berikut (Pintek.id, 2021):

1. Pemerataan keuangan setiap daerah untuk membiayai daerah tersebut.
2. Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan.
3. Mengurangi kesenjangan fiskal setiap daerah di Indonesia.

Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat harus diminimalisir karena jika pemerintah daerah bergantung dengan berlebihan maka dampaknya juga tidak baik, hal tersebut terlihat dalam pemenuhan kebutuh artinya semakin kuat pemda bergantung pada administrator sentar maka akan berdampak pada kinerja keuangan dalam pemerintahan (Handayani & Kusuma, 2017). Dalam mencari tingkat ketergantungan dapat diukur melalui perhitungan dari dana perimbangan dibagi dengan total pendapatan. Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk mengawasi program yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam menerapkan dan menggunakan APBD untuk mencapai kinerja serta keuanagan yg baik (Pandansari, 2016).

Studi Noviyanti & Kiswanto (2016) mengatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah secara signifikan. Hal ini dikarenakan semakin kuat pemerintah pusat memberikan dana perimbangan ke pemda maka semakin kuat merak akan bergantung pada pusat sehingga mereka tidak berusaha meningkatkan pendapatan selaiin itu kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi mereka juga masih sangat terbatas. Riset ini juga selaras dengan riset yang dilakukan oleh Primadiva, Rosdini, dan Srimulyani (2021) menyatakan bahwa tingkat ketergantungan pada pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₄: Tingkat Ketergantungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.



Gambar 1 Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Riset ini memakai metode kuantitatif yang datanya berasal dari data skunder yakni pengangguran dan kemiskinan diperoleh dari BPS melalui laman <https://www.bps.go.id>. Sedangkan kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketergantungan diperoleh dari LRA Kab/Kota Se-Jateng tahun 2015-2020 yang didapatkan melalui situs resmi Provinsi Jawa Tengah pada website <http://djpk.kemekeu.go.id> yang berupa realisasi APBD.

Populasi dan Sampel

Ranah generalisasi mencakup subjek/objek dengan spesifik dan kualitas tertentu yang perlu peneliti pelajari dan ambil kesimpulannya disebut populasi (Sugiyono, 2018). Di dalam riset ini populasinya adalah Laporan Realisasi Anggaran pada pemerintah daerah rentang waktu dari 2015-2020 yang terdiri dari 35 kabupaten/kota pada Provinsi JATENG.

Penarikan sampel menggunakan purposive sampling yang berarti cara pengambilan dengan memakai kriteria (Sugiyono, 2018). Berikut adalah karakteristik nya :

Hasil pengambilan sampel		
No	Karakteristik	Total
1.	Realisasi APBD yang terdaftar DJPK, presentase pengangguran dan kemiskinan dalam BPS pada Provinsi Jawa Tengah rentang waktu 2015-2020.	35
2.	Kabupaten/kota Se-JATENG yang tidak mempublikasi secara lengkap rincian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya pada DJPK jangka waktu dari 2015-2020.	(5)
Jumlah sampel yang memenuhi		30
Sampel secara keseluruhan 30 x 6 tahun penelitian		180
Outlier		53
Jumlah sampel secara keseluruhan setelah outlier		127

Teknik Pengumpulan Data

Didalam riset ini pengumpulan data menggunakan studi literatur yakni teknik pengumpulan yang berasal dari buku, jurnal, internet, makalah yang relevan dengan problem yang diangkat (Sugiyono, 2018). Tes statistik memakai analisis regresi berganda yang diolah dengan SPSS versi 26.

Definisi Variabel Dan Pengukuran Variabel

Dalam riset ini memakai satu variabel terikat yakni kinerja keuangan pemerintah daerah, dan empat variabel bebas yakni pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat ketergantungan. cara pengukuran berikut ini:

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah hasil kerja yg telah sudah dicapai pada bagian finansial daerah yang didalamnya memuat sumber penghasilan dan biaya daerah yang telah ditentukan peraturan berdasarkan UU selama jangka waktu tertentu. yang didalamnya memuat sumber penerimaan berikut rumus penghitungannya (Mahmudi, 2016) :

$$\frac{\text{Belanja Modal tahun (1)} - \text{Belanja modal tahun (x-1)}}{\text{Belanja modal tahun (x-1)}} \times 100\%$$

2. Variabel bebas sebagai berikut :

- a. Pengangguran ialah keadaan dimana seseorang sedang mencari pekerjaan atau tergolong sebagai angkatan kerja tetapi mereka belum memiliki pekerjaan (Pratama, 2021). Pengangguran diukur menggunakan rumus sebagai berikut (BPS,2021):

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

- b. Pertumbuhan ekonomi ialah proses untuk memahami bagaimana ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang (Berliani, 2016) atau dapat diartikan sebagai adanya suatu peningkatan ekonomi dalam waktu jangka panjang di suatu rumus perhitungannya (Mahmudi, 2016).

$$\frac{\text{PAD tahun (1)} - \text{PAD tahun}(x - 1)}{\text{PAD tahun}(x - 1)} \times 100\%$$

- c. Kemiskinan ialah keadaan dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan seluruh aspek kehidupannya seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dll (Arfiani, 2019). Kemiskinan dapat diukur menggunakan rumus berikut (BPS, 2021):

$$Po = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left| \frac{z - y_i}{z} \right|_0$$

- d. Tingkat ketergantungan dapat dilihat dari banyaknya dana perimbangan yang ditransfer administrator sentral kepada administrator wilayah (Rahmawaty & Aulia, 2020)

$$\frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Teknik Analisis

Dalam riset ini teknik analisis data yang digunakan yakni (Nurtantiono, 2021) :

- a. Uji Asumsi Klasik :

1. Uji Normalitas ialah untuk mengevaluasi persebaran data apakah normal atau tidak dengan kriteria normal jika $\text{sig} \geq 0,05$.
2. Uji Heteroskedastisitas ialah situasi dimana varians variabel tidak sama pada semua observasi dalam model regresi, dengan kriteria tidak terjadi gejala tersebut apabila $\text{sig} \geq 0,05$.
3. Uji Multikolinieritas sebagai korelasi anatara variabel independen untuk evaluasi ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dengan kriteria tidak mengalami hal tersebut jika $\text{tolerance} \geq 0,10$ atau $\text{vif} < 10$.
4. Uji Autokorelasi ialah untuk mengevaluasi apakah ada korelasi antara periode t dengan periode t-1.

- b. Analisis Regresi Berganda

- c. Uji R^2 (koefisien determinasi) untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh

- variabel bebas terhadap variabel terikat.
- d. Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat.
 - e. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, dengan kriteria berpengaruh bila nilai $\text{sig} < 0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini merupakan hasil uji analisis statistik deskriptif :

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengangguran	127	,00	8,24	3,9450	2,13118
Pertumbuhan Ekonomi	127	-20,67	54,61	9,7995	14,27312
Kemiskinan	127	6,66	21,45	12,5767	3,66389
Tingkat Ketergantungan	127	50,52	71,66	61,2827	4,20882
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	127	-33,08	75,30	5,2351	23,54402
Valid N (listwise)	127				

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pada riset ini dilakukan dengan memakai teknik *Uji Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp.sig (2-tailed)* yakni 0,200. Nilai tersebut diatas 0,05 artinya dalam riset ini nilai berdistribusi normal.

Tabel 2. Uji Normalitas

	Unstandardized/Residual
N	127
Asymp.Sig.(2-tailed)	0,200

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Uji Heteroskedastisitas

Riset ini memakai *Uji Glester* dimana nilai sig. semua variabel bebas memiliki nilai $\geq 0,05$ sehinggann tiidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3. Uji Heterkedastisitas

Model	Sig
Pengangguran	0,678
Pertumbuhan ekonomi	0,806
Kemiskinan	0,556
Tingkat ketergantungan	0,931

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Uji Multikolinieritas

Riset ini menunjukkan kalau nilai $VIF \leq 10$, sedangkan nilai *tolerance* $\geq 0,10$. Sehingga pada semua variabel bebas tidak terjadi gejala multikolinieritas.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

	Tolernce	VIF
Pengangguran	0,822	1,217
Pertumbuhan ekonomi	0,990	1,010
Kemiskinan	0,984	1,016
Tingkat ketergantungan	0,817	1,224

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Uji Autokorelasi

Riset ini memakai *Uji Durbin-Watson* dengan kriteria $DW > DU$ dan $DW < 4-DU$ dengan hasil diketahui $1,878 > 1,776$ dan $1,878 < 2,224$. Maka pada riset ini tidak terjadi gejala autokorelasi.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

r	R.square	Adj. R.Square	DW
,541 ^A	,292	,269	1,878

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6. Analisis Regresi Berganda

	B	Std.Error
Constant	-65,704	30,585
Pengangguran	-4,033	,928
Pertumbuhan ekonomi	0,218	,126
Kemiskinan	0,788	,493
Tingkat ketergantungan	1,221	,471

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Persamaan regresi linier berganda berikut ini :

$$Y = -65,704 - 4,033x_1 + 0,218x_2 + 0,788x_3 + 1,221x_4$$

4.3 Koefisien determinasi (R^2)

Tabel 7. Koefisien Determinasi (R^2)

R. Square	Adj. R Square
,292	,269

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Diketahui hanya sebesar 26,9% yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh variabel pengangguran, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta ketergantungan karena nilai Adj. R Square sebesar 0,269. Sedangkan sisanya sebesar 73,1% dipengaruhi komponen yang berbeda yang berasal dari luar variabel dalam riset ini.

4.4 Uji F

Tabel 8. Uji Simultan (Uji F)

F hitung	Sig.	Keterangan
12,602	,000 ^b	Berpengaruh secara bersama-sama

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Pada riset ini F hitung 12,602 dan tingkat sig, 0,000 atau $0,000 < 0,05$ artinya X_1, X_2, X_3 , Dan X_4 berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y.

4.5 Uji T

Tabel 9. Uji Parsial (Uji T)

	B	T	Sig.
Constant	-65,704	-2,148	0,034
Pengangguran	-4,033	-4,345	0,000
Pertumbuhan ekonomi	0,218	1,727	0,087
Kemiskinan	0,788	1,597	0,113
Tingkat ketergantungan	1,221	2,590	0,011

Sumber : hasil output IBM SPSS statistics 26 yang diolah

Dalam uji parsial diperoleh bahwa variabel pengangguran memiliki nilai sig, 0,000 dan tingkat ketergantungan 0,011 artinya kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena memiliki nilai sig $< 0,05$, sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi nilai sig, 0,087 dan kemiskinan nilai sig, 0,113 artinya kedua variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena nilai sig $> 0,05$.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai hasil uji T sebesar 0,000 atau $< 0,05$ berarti X_1 mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Penyebabnya berkurangnya program-program yang dijalankan pemerintah yang seharusnya dapat menambah lapangan kerja bagi masyarakat tetapi program-program tersebut dikurangi, sehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan pekerjaan dan membuat pendapatan mereka berkurang selain itu akan menambah tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Apabila hal ini dibiarkan secara terus menerus maka akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Riset ini didukung oleh riset yang dilakukan (Harimurti et al., 2017) menunjukkan pengangguran mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai uji T menghasilkan 0,087 atau $> 0,05$ artinya X_2 tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, terjadi karena teknologi, SDM, modal, serta SDA belum diimplementasikan secara maksimal sehingga belum dapat menambah realisasi penerimaan keuangan pemerintah daerah. Studi ini sejalan pada studi (Suryono et al., 2019) menunjukkan kalau pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Uji t diperoleh nilai 0,113 atau $> 0,05$ artinya X_3 tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, keadaan ini disebabkan karena keadaan alam, masyarakat, eksploitasi, faktor teknologi, faktor kelembagaan dan struktural tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah dan kemungkinan besar atau kecilnya tingkat kemiskinan belum tentu berdampak. Studi ini didukung oleh studi Panggiarti & Hafan (2020) menyatakan kalau kinerja pengelolaan keuangan pemda tidak dipengaruhi kemiskinan di Kabupaten Magelang.

4. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil uji t menyatakan kalau nilainya $< 0,05$ yakni 0,011 artinya X_4 mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan. Hal tersebut karena semakin besar jumlah dana perimbangan dari sentral untuk daerah maka akan terlihat pula semakin bergantungnya penguasa daerah kepada sentral sehingga penguasa daerah tidak akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah lagi. Hal tersebut membuat ketergantungan penguasa daerah terhadap sentral makin meningkat. Hasil riset ini didukung dari riset Kiswanto dan Noviyanti (2016) dan (Srimulyani et al., 2021) yang menyatakan tingkat ketergantungan pada pusat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan olah data dapat disimpulkan bahwa variabel pengangguran, dan tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sementara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Adapun Keterbatasan dari riset ini yaitu kontribusi variabel independen terhadap

variabel dependen hanya sebesar 29,2 % untuk di pemerintah daerah sehingga masih ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi variabel dependen. Riset ini berfokus pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah sehingga sampel yang di gunakan masih sangat sedikit karena data yang perlukan dan yang dipublish dalam web resmi pemerintah masih kurang memadai dan tidak seimbang sehingga penggunaan sampel ini masih kurang untuk mengetahui gambaran secara jelas dan kondisi yang sebenarnya terhadap objek penelitian.

Berdasarkan keterbatasan saran untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan studi terkait komponen yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk menambah sampel dan variabel independen yang digunakan untuk menghasilkan gambaran secara jelas, keakuratan data dan kebaharuan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amir, H., & Nurhayati, N. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1). <https://journal.unikuac.id/index.php/jeam>
- [2] Arfiani, D. (2019). *Berantas Kemiskinan*. Semarang:ALPIRIN.
- [3] Asep Nurcahyanto, & Mulyani, E. (2016). *Ekonomi 2 untuk kelas XI SMA dan MA*. Edisi Revisi. Solo: Tiga Serangkai Mandiri.
- [4] Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten banjar.(2021) kinerja keuangan pemerintah daerah. Diakses melalui <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/category/pengelolaan-keuangan/page/12/>
- [5] Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. 2021.<https://bappelitbangda.pasuruankota.go.id/2021/09/23/tingkat-pengangguran-terbuka-tahun-2016-2018/>
- [6] Badan Pusat Statistik.(2021). Pengangguran Terbuka. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>
- [7] Badan Pusat Statistik.(2021). Presentase Pengangguran dan Kemiskinan. Diakses melalui <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>
- [8] Berliani, K. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 121–144.
- [9] Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.(2021). Laporan Realisasi APBD. Diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- [10] Ermawati, Andaresta, H., & Aswar, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Ukuran (Size) Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/13359>
- [11] Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi-9. Semarang : Universitas Diponegoro.
- [12] Handayani, N., & Kusuma, A. R. (2017). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(1), 404–420.

- [13] Harimurti, F., Suharno, & Raharja, A. K. Y. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus di Wilayah Soloraya Periode 2013 - 2015). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(April), 1-15.
- [14] Ikhsan, A. Dan H. B. S. (2008). *Teori Akuntansi Dan Riset Multiparadigma*. Graha Ilmu.
- [15] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah." *Kementerian Keuangan*, 51(1), 212.
- [16] Kiswanto., & Noviyanti, N.,A (2016).Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.*Accounting Analysis Journal*.5(1). <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- [17] Komunikasi Informasi Jawa Timur.(2021). *Kadisdakertrans: Ada 5 Penyebab Terjadinya Pengangguran*. Diperoleh dari <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/kadisdakertrans-ada-5-penyebab-terjadinya-pengangguran>
- [18] Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:Uii Press Merdeka.
- [19] Merdeka. (2021). *Ekonom Sebut Pertumbuhan Ekonomi RI 10 Tahun Terakhir Sudah dalam Tren Menurun*. Merdeka. <https://www.merdeka.com/uang/ekonom-sebut-pertumbuhan-ekonomi-ri-10-tahun-terakhir-sudah-dalam-tren-menurun.html>
- [20] Naga, M., Hw, E. F., Rahayuningsih, D., dkk .(2018). *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas).<https://www.bappenas.go.id/id/profil-bappenas/unit-kerja/deputi-bidang-kemiskinan-ketenagakerjaan-dan-ukm/direktorat-penanggulangan-kemiskinan/contents-direktorat-penanggulangan-kemiskinan/analisis-wilayah-dengan-kemiskinan-tinggi/>
- [21]]Nurtiantono, A. (2021). *Analisis Regresi-Kasus Dan Analisis Dengan SPSS*. STIE SURAKARTA.
- [22] Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366>
- [23] Panggiarti, E. K., & Hafan, F. A. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonoimi Manajemen Dan Akuntansi*, 16(2), 61-76.
- [24] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.(2021). Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 Tentang Jalan*, 21.
- [25] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.(2021).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diakses tanggal 5 November 2021
- [26] Pintek.id. (2021). Manfaat dana alokasi umum dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah di indonesia.diperoleh dari <https://pintek.id/blog/dana-alokasi-umum/#:~:text=Dana Alokasi Umum merupakan sejumlah,yang digunakan sebagai dana pembangunan.>
- [27] Pratama, A. M. (2021). Apa yang Dimaksud dengan Pengangguran. diperoleh dari

- <https://money.kompas.com/read/2021/08/03/120000126/apa-yang-dimaksud-dengan-pengangguran-?page=all>
- [28] Pratama, A. M. (2021). Penyebab Pengangguran dan Dampak Terhadap Pembangunan Nasional. diperoleh dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/21/180000526/penyebab-pengangguran-dan-dampak-terhadap-pembangunan-nasional>
- [29] Priyatin, S. (2020). *Catatan 2020, Pertumbuhan Ekonomi Jateng Turun, Angka Kemiskinan dan Pengangguran Meningkat.* diperoleh dari <https://regional.kompas.com/read/2020/12/30/23341051/catatan-2020-pertumbuhan-ekonomi-jateng-turun-angka-kemiskinan-dan>
- [30] Ramandani, R. F. (2017). Analisis Kinerja Dan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda. *Ekonomia*, 5(3), 327–345.
- [31] Rahmawaty, & Aulia, R. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- [32] Santoso, A. B. (2018). *Tutorial dan Solusi Pengolahan Data Regresi.* Agung Budi Santoso.
- [33] Sari, I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legeslatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinta Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekomomi*, 3(1), 679–692.
- [34] Srimulyani, & Primadiva, P. P. D. R. (2021). Pengaruh Tingkat Kekayaan dan Tingkat ketergantungan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 299–310.
- [35] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif.* Bandung:Alfabeta.
- [36] Suryanta, S. (2019). Pengaruh Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan Di Kota Depok. *Cakrawala Management Business Journal*, 2(2), 372. <https://doi.org/10.30862/cm-bj.v2i2.45>
- [37] Suryono, B., Heryanti, C. dwi, & Wahidahwati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.25139/Jaap.V3i1.1721>
- [38] Undang-Undang Republik Indonesia.(2021).Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah